

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi kerap menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan sekaligus alat untuk membaca kemajuan perekonomian suatu negara. Ia adalah indikator yang mencerminkan kondisi finansial masyarakat, sekaligus proses menuju perbaikan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu yang juga berarti peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa melalui kenaikan pendapatan nasional. Kesejahteraan pun dinilai dari sejauh mana kemampuan suatu negara membangun ekonominya. Indonesia, sebagai negara berkembang, tentu tak luput dari kondisi tersebut, dengan berbagai target yang diharapkan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan perekonomian yang kian kokoh.²

Secara konseptual, peningkatan pendapatan asli daerah mencerminkan meluasnya basis perpajakan akibat tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal seperti investasi, operasi bisnis, dan konsumsi. Dalam konteks regional, konsistensi kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan menjadi indikator bahwa dinamika ekonomi daerah selaras dengan tren pertumbuhan nasional, yang sekaligus menandai perbaikan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan pajak.³

² Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin, "Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 40–47.

³ Todaro, Michael P. (2017). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia

Tabel 1. 1

Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Provinsi Jawa Timur 2020-2024

NO	Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan (persen)
1	2020	-2.33
2	2021	3.56
3	2022	5,34
4	2023	4,95
5	2024	4,93

(sumber: Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan data tersebut, laju pertumbuhan PDRB selama 2020-2024 terlihat fluktuatif menunjukkan proses pemulihan pascapandemi sekaligus upaya menjaga stabilitas ekonomi. Meski trennya positif, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih belum stabil dari tahun ke tahun, sehingga memunculkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perubahan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Fluktuasi ini juga menandakan tantangan dalam mempertahankan kestabilan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata lintas sektor.

Berdasarkan hasil kajian dalam jurnal yang mengacu pada teori pertumbuhan endogen Paul Romer, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh inovasi dan akumulasi pengetahuan sebagai penggerak utama pertumbuhan jangka panjang.⁴ Hal ini berbeda dengan pandangan teori pertumbuhan eksogen yang memperlakukan kemajuan teknologi sebagai variabel luar yang tidak dijelaskan dalam model.⁵

Secara normatif, kontribusi wajib yang bersifat memaksa ini merupakan fondasi utama pendanaan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor

⁴ Lukman Hakim Piliang, "Ukm Penggerak Roda Perekonomian Nasional," *Public Administration Journal* 8, no. 1 (2024): 1–8.

⁵ Ibid.

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Besaran penerimaannya secara langsung menentukan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai belanja operasional maupun pembangunan, mengingat pajak adalah iuran tanpa imbalan langsung yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.^{6 7}

Indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu reformasi meliputi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, terciptanya tata kelola yang efektif dan efisien, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam konteks reformasi perpajakan daerah, keberhasilan dapat diidentifikasi apabila reformasi tersebut mampu menghasilkan sistem yang bebas dari praktik korupsi, membangun mekanisme perpajakan yang sederhana namun optimal sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya, serta memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kualitas layanan administrasi perpajakan, khususnya dalam aspek kepatuhan wajib pajak.⁸

Sebagai sumber pendapatan utama negara, penerimaan pajak yang mencakup pajak dalam negeri maupun dari perdagangan internasional memiliki karakteristik berkelanjutan serta potensi optimalisasi agar selaras dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah. Penerimaan ini berfungsi membiayai belanja negara, dengan peran yang diproyeksikan terus menguat ke depan guna mewujudkan kemandirian pembiayaan.⁹ Berikut disajikan realisasi pendapatan pemerintah Jawa Timur 2020-2024:

⁶ Arfah Habib Saragih, "Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia the Effect of Tax Revenue on the Economic Growth in Indonesia," *Sikap* 3, no. 1 (2018): 17–27, <http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>.

⁷ Mardiasmo, (2019). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi Offset.

⁸ Saragih, "Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia the Effect of Tax Revenue on the Economic Growth in Indonesia."

⁹ Martiasih Nursanti et al., "Tinjauan Perencanaan Penerimaan Perpajakan Dan Realisasinya, (2008): 1–14.

Tabel 1. 2**Realisasi Pendapatan Pemerintah Jawa Timur tahun 2020-2024 (rupiah)**

No	Jenis Pendapatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah	121.376 36	297.009 78	328.485 50	358.337 96	360.520 28
2	Pajak Daerah	23.263 32	199.3066 00	238.828 92	259.530 55	261.655 89
3	Retribusi Daerah	1.217 77	8.481 22	8.530 69	9.640 53	44.399 71
4	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah	922. 86	9.480 63	10.921 72	13.268 74	11.508 36

(sumber data: Direktorat jendral perimbangan keuangan)

Tren peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim sepanjang 2020–2024 mencerminkan penguatan kapasitas fiskal pascapandemi, terutama dari sektor pajak yang mengindikasikan pemulihan aktivitas ekonomi, investasi, serta daya beli masyarakat. Kontribusi retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turut menunjukkan optimalisasi sumber pendapatan. Meski demikian, tantangan tetap ada terkait kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Selain dari sisi penerimaan pajak, belanja pemerintah juga menjadi faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kerangka pengelolaan fiskal yang tertuang pada APBN dan APBD, kebijakan belanja ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, produksi, serta kesempatan kerja, sembari mendorong kemajuan ekonomi. Besaran kontribusinya terhadap pertumbuhan sangat ditentukan oleh sumber pembiayaan yang digunakan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara bijak dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya serta

modal produktif secara optimal, sehingga keseimbangan fiskal tetap terjaga, utang tidak membebani, dan pertumbuhan jangka panjang dapat terus didorong.¹⁰

Tabel 1. 3
Belanja Daerah Jawa Timur tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah
2020	32.286,76
2021	33.852,94
2022	31.502,86
2023	34.290,32
2024	34.560,75

(sumber: Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan temuan data penelitian belanja daerah Jawa Timur dari tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat secara keseluruhan, dapat dihubungkan dengan fenomena ekonomi yang terjadi selama periode tersebut. Fluktuasi belanja daerah tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2022 terjadi penurunan akibat fokus pemerintah pada efisiensi anggaran dan penataan prioritas belanja. Namun, peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pemulihan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan belanja untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fenomena ini menggambarkan bagaimana belanja daerah berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal daerah.

Terdapat teori yang mengingatkan bahwa pengeluaran pemerintah yang tidak bijak dan terlalu bergantung pada dana dari luar negeri bisa menyebabkan utang yang

¹⁰ Merri Anitasari and Ahmad Soleh, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu,” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 2 (2015): 117–127.

sangat besar serta inflasi, yang akhirnya bisa menghambat pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, kondisi pengeluaran di Jawa Timur yang kadang naik turun dan memerlukan pendanaan yang terus-menerus sesuai dengan teori ekonomi modern yang dikenal sebagai Model Keynesian. Teori ini dikembangkan berdasarkan karya-karya John Maynard Keynes, seorang ekonom asal Inggris pada abad ke-20. Inti dari Model Keynesian adalah gagasan bahwa pasar tidak selalu bisa mencapai keseimbangan sendiri dalam jangka pendek, terutama saat terjadi ketidakseimbangan antara permintaan agregat, yaitu total permintaan dalam perekonomian, dan produksi agregat, yaitu total barang dan jasa yang diproduksi. Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dan kebijakan moneter untuk mendorong atau mengatur tingkat pengeluaran agregat di dalam perekonomian.¹¹

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pencapaian pembangunan manusia terukur lewat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang merupakan hasil olahan dari angka harapan hidup, tingkat melek huruf dan jenjang pendidikan, serta kemampuan daya beli. Bila IPM suatu wilayah tinggi, maka kualitas hidup masyarakat ikut membaik dan pada akhirnya mampu mendorong produktivitas, kreativitas, sekaligus pertumbuhan ekonominya.¹² Dapat kita lihat data terbaru terkait IPM:

¹¹ Cooky Adhikara et al., *EKONOMI MODERN Dasar-Dasar Dan Implikasinya*, Yayasan Literasi Sains Indonesia, 2024.

¹² Moh Muqorrobin and Ady Soejoto, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 3 (2017).

Tabel 1. 4
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2020-2024

No	IPM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup	71.30	71.38	71.74	74.87	75.07
2	Indeks Kesehatan	0.79	0.79	0.80	0.84	0.85
3	Harapan Lama Sekolah	13.19	13.36	13.37	133.38	13.43
4	Rata'' Lama Sekolah	7.78	7.88	8.03	8.11	8.28
5	Indeks Pendidikan	0.63	0.63	0.64	0.64	0.65
6	Indeks Pembangunan Manusia	73.04	73.48	74.05	74.65	75.35

(sumber: Badan Pusat Statistik)

Meskipun terdapat kesenjangan antarwilayah serta pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan yang masih menjadi tantangan, capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur dari 2020 hingga 2024 terus meningkat secara konsisten, yang mencerminkan kemajuan nyata dalam kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup sebagai wujud pembangunan manusia yang progresif dan upaya berkelanjutan yang berhasil di wilayah tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada dua kerangka utama: Teori Pertumbuhan Endogen dari Paul Romer yang menyoroti faktor internal seperti modal manusia, inovasi, dan pengetahuan sebagai penggerak ekonomi,¹³ serta Model Keynesian yang memberi porsi pada peran pemerintah dalam mengelola permintaan agregat guna mencapai kesempatan kerja penuh. Keduanya selaras dengan kajian ini mengingat penerimaan pajak yang meningkat memperkuat fiskal negara untuk

¹³ Made Verry Martin, "Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang Berkelanjutan Periode 2019-2023" 8 (2025): 23–37.

membiayai belanja produktif sementara IPM yang membaik mencerminkan investasi pada kualitas manusia yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang.¹⁴

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan temuan yang beragam. Haifa Azalia Pinem dkk. menyimpulkan penerimaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, sementara Merri Anitasari dan Ahmad Soleh membuktikan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan di Bengkulu. Rahmat Dwi Zakariah turut menguatkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, menekankan peran krusial peningkatan kualitas manusia.^{15 16}

17

Penelitian ini mengambil lokus di Provinsi Jawa Timur mengingat kontribusinya yang menempati urutan kedua dalam PDB nasional serta posisinya yang strategis dalam struktur ekonomi kawasan timur Indonesia. Selain itu, Jawa Timur dipandang representatif karena memiliki keragaman sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, agrikultur, dan jasa, sehingga memungkinkan pengujian yang komprehensif terhadap pengaruh penerimaan pajak, belanja pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, pemilihan wilayah ini juga didasarkan pada kedekatan peneliti dengan daerah tersebut, sehingga peneliti lebih memahami kondisi dan permasalahan yang ada serta lebih mudah dalam memperoleh data yang relevan dan akurat.

¹⁴ Dkk Putri, Ivena Adhina, "Neraca TEORI-TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI," *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 182–192, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>.

¹⁵ Cinta Marito Simbolon et al., "Analysis of the Influence of Poverty, Human Development Index, and Population on Income Inequality in North Sumatra 2018-2022," *Indonesian Journal of Advanced Research* 2, no. 10 (2023): 1387–1406.

¹⁶ Anitasari and Soleh, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu."

¹⁷ Rahmat Dwi Zakaria, "Produktivitas, Analisis Kerja, Tenaga Industri, Sektor Dan, Besar," *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* 6, no. 1 (2022): 156–167, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/20343>.

Meskipun sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, fluktuasi masih terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir, menandakan adanya dinamika yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait peran masing-masing variabel tersebut. Dengan latar itu, peneliti bermaksud melakukan pengujian empiris secara kuantitatif untuk memperoleh simpulan menyeluruh mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama 2020-2024. Studi ini menjadi penting guna menganalisis hubungan optimalisasi penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi, mengevaluasi efektivitas belanja pemerintah yang bersumber dari pajak dalam mendukung pembangunan, serta menelaah kontribusi IPM sebagai proksi kualitas sumber daya manusia terhadap produktivitas dan kinerja ekonomi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perpajakan, prioritas belanja, serta penguatan pembangunan manusia yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan ekonomi Jawa Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan ketidakstabilan laju pertumbuhan, meskipun secara umum menunjukkan tren positif.
- b. Penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahun, namun belum diketahui sejauh mana peningkatan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Pengeluaran pemerintah daerah bersifat fluktuatif, yang mengindikasikan adanya dinamika dalam kebijakan fiskal serta efisiensi alokasi anggaran yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi.

- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, namun belum dapat dipastikan sejauh mana peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut berimplikasi langsung pada pertumbuhan ekonomi.

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) indeks pembangunan manusia (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Jawa Timur.
- b. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa realisasi Penerimaan Pajak dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Pengeluaran Pemerintah dari Dinas Pendapatan Daerah (BAPENDA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pertumbuhan Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) (PDRB harga konstan) periode 2020–2024.
- c. Variabel lain di luar penerimaan pajak daerah dan pengeluaran pemerintah yang juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, inflasi, jumlah penduduk, maupun faktor eksternal global, tidak dibahas dalam penelitian ini.
- d. Analisis yang digunakan dibatasi pada pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara peningkatan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur?

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur?
4. Seberapa besar pengaruh peningkatan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara peningkatan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh secara simultan antara penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ataupun manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, antara lain.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menyumbangkan manfaat positif terhadap perkembangan keilmuan terutama pada para ekonom syariah. Selain itu, dilakukannya penelitian ini mampu berkontribusi dan memberikan peran terhadap perkembangan dunia riset pada program studi Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya berkaitan dengan konteks penelitian seputar pengaruh peningkatan penerimaan pajak daerah, pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan belajar bagi mahasiswa dalam menelaah kaitan penerimaan pajak, belanja pemerintah, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkaya pemahaman mereka atas penerapan teori makro dan pembangunan pada data empiris Jawa Timur.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini menjadi rujukan untuk studi selanjutnya mengenai dampak pajak, belanja pemerintah, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

c. Bagi Pemerintah Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan fiskal, terutama dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja pemerintah, serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan periode data 2020–2024 dari DJPK dan BPS Jatim, penelitian ini secara kuantitatif mengaitkan tiga variabel bebas penerimaan pajak, belanja pemerintah, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat, sembari menyadari bahwa faktor lain sengaja tidak dilibatkan agar pembahasan tetap fokus pada rumusan masalah.

G. Penegasan Variabel

Pada penelitian ini penegasan variabel meliputi penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun tujuannya untuk memperjelas variabel sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

1. Variabel Bebas (X): Peningkatan Penerimaan Pajak

a. Penegasan Konseptual

Penerimaan pajak adalah seluruh pendapatan negara yang didapatkan dari pungutan pajak, baik yang berasal dari pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah, yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah serta mendukung pembangunan negara.¹⁸

b. Penegasan operasional

Data penelitian ini diperoleh dari total penerimaan pajak daerah (dalam rupiah) Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun pada 2020–2024,

¹⁸ Mardiasmo, *No Title, Perpajakan Edisi Terbaru*, 2019.

bersumber dari laporan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan (DJP) dan Badan pusat Statistik (BPS).¹⁹

2. Variabel Bebas (X): Pengeluaran Pemerintah

a. Penegasan Konseptual

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh biaya yang dihabiskan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan berjalannya pemerintahan, menyediakan barang dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan kehidupan sosial agar kesejahteraan rakyat meningkat.²⁰

b. Penegasan Operasional

Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah uang yang benar-benar digunakan dalam belanja pemerintah daerah (dalam rupiah), yang tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Pengeluaran ini mencakup semua jenis belanja yang dilakukan daerah, baik untuk operasional sehari-hari maupun pembangunan jangka panjang, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut.²¹

1. Variabel Bebas (X): Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Penegasan Konseptual

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang menggabungkan tiga faktor utama untuk menilai sejauh mana pembangunan

¹⁹ Muhammad Rizal Rosyadi, "DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI INDONESIA" 4, no. 2 (2024): 222–231.

²⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, 2016.

²¹ Yulianti dan Daud, "TEORI PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMERINTAH KAJIAN EKONOMI SYARIAH" 7 (2021): 119–124.

manusia berhasil: kesehatan yang baik, usia harapan hidup, tingkat pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup yang layak. Indeks ini menunjukkan seberapa baik atau buruk kondisi hidup masyarakat secara keseluruhan, dan merupakan acuan penting untuk menilai kebahagiaan dan kesejahteraan.²²

b. Penegasan Operasional

Penelitian ini menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan nilai IPM yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Provinsi Jawa Timur setiap tahun selama periode 2020-2024.²³

2. Variabel Terikat (Y): Pertumbuhan Ekonomi

a. Penegasan Konseptual

Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana kemampuan sebuah perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa meningkat, yang dapat dilihat dari naiknya pendapatan negara atau hasil produksi dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan penambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.²⁴

b. Penegasan operasional

Laju pertumbuhan tahunan PDRB berbasis harga konstan di Jawa Timur sepanjang 2020-2024 menjadi dasar pengukuran variabel ini, dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.²⁵

²² Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, 2024.

²³ Elsa Novri Regina et al., "Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Sumatera Utara Tahun 2010 – 2023" 13, no. 1 (2025).

²⁴ Dahlan Tampubolon et al., *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi*, 2025.

²⁵ Azwar Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia," *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 2 (2016): 149–167.

H. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini mengawali penelitian dengan latar belakang masalah, kemudian merumuskan fokus utama, lalu menyampaikan arah tujuan, diikuti manfaat yang diharapkan, setelah itu membatasi jangkauan melalui ruang lingkup serta penegasan definisi variabel kunci, dan terakhir menyajikan sistematika penulisan sebagai panduan strukturnya.

2. BAB II: Landasan Teori

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, mencakup definisi, konsep-konsep penting, serta kerangka pemikiran yang menaungi penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis juga melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki ketertarikan dengan topik bahasan.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara detail metode penelitian yang diterapkan, termasuk pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, serta teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selain itu, dijelaskan pula mengenai cara pengambilan sampel (teknik sampling), karakteristik kelompok subjek yang diteliti (populasi), dan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi (instrumen penelitian). Bab ini memegang peranan penting dalam menjelaskan proses perolehan dan analisis data secara ilmiah.

4. BAB IV: Hasil

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh. Data yang terkumpul ditampilkan melalui tabel, grafik, atau penjelasan naratif yang bertujuan untuk

mengilustrasikan poin-poin penting yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. penyajian hasil dilakukan secara faktual.

5. BAB V: Pembahasan

Bab ini merupakan analisis mendalam terhadap hasil yang terdapat pada bab IV. Hasil-hasil yang diperoleh dievaluasi dengan menghubungkannya pada landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pembahasan ini bertujuan untuk memperjelas makna serta signifikansi dari hasil penelitian yang didapatkan.

6. BAB VI: Penutup

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan. Bab kesimpulan akan merangkum inti dari hasil penelitian yang didapatkan. Bagian ini juga akan mengemukakan tentang saran-saran yang dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya atau praktisi yang berkaitan dengan topik yang diteliti.